
RANTAI NILAI DAN KEADILAN EKONOMI DALAM KOMODITAS PERIKANAN LOKAL: SINTESIS GLOBAL DAN PEMBELAJARAN UNTUK INDONESIA

Asep Satria Yudha Bhermana^{1*}, Ade Hidayat Ilka², Junaidi³,
Harfiandri Damanhuri^{4*}

Universitas Bung Hatta, Padang

E-mail: ¹satriayudha84@gmail.com, ^{4*}harfiandri@bunghatta.ac.id

Abstract: *The fisheries value chain plays a crucial role in determining the distribution of economic benefits and the welfare of coastal communities. However, global studies consistently reveal that small-scale fishers—the primary producers—receive a disproportionately low share of the total value generated within seafood markets. This review analyzes 20 international publications (2021–2025) addressing the intersection of value chains, economic justice, and fisheries governance. A thematic synthesis approach was employed, comparing global contexts (Latin America, Africa, Southeast Asia) with Indonesia. The findings show that economic justice is influenced not only by market mechanisms but also by social, institutional, and policy factors. The Indonesian case highlights persistent value inequalities caused by unbalanced market structures, weak social protection, and limited local participation. The article concludes with recommendations for governance reforms emphasizing access rights, representation, and redistributive mechanisms to build fair and sustainable fisheries systems.*

Keywords: *Economic Justice; Governance; Indonesia; Small-Scale Fisheries; Value Chain*

Abstrak: Rantai nilai perikanan memainkan peran penting dalam menentukan distribusi nilai ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Namun, berbagai studi global menunjukkan bahwa nelayan kecil sebagai produsen utama seringkali menerima bagian nilai ekonomi yang sangat kecil dibandingkan pelaku di tingkat hilir. Artikel ini merupakan tinjauan sistematis terhadap 20 publikasi ilmiah internasional (2021–2025) yang membahas hubungan antara rantai nilai, keadilan ekonomi, dan tata kelola perikanan. Analisis dilakukan melalui pendekatan sintesis tematik dengan membandingkan konteks global (Amerika Latin, Afrika, Asia Tenggara) dan Indonesia. Hasil menunjukkan bahwa keadilan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh mekanisme pasar, tetapi juga oleh faktor sosial, kelembagaan, dan kebijakan. Kasus Indonesia memperlihatkan bahwa perikanan lokal masih menghadapi ketimpangan nilai akibat struktur pasar yang tidak seimbang, lemahnya perlindungan sosial, dan minimnya partisipasi lokal. Artikel ini merekomendasikan reformasi tata kelola yang berfokus pada hak akses, representasi, serta redistribusi nilai ekonomi bagi nelayan kecil menuju sistem perikanan yang adil dan berkelanjutan.

Kata kunci: Indonesia; Keadilan Ekonomi; Perikanan Skala Kecil; Rantai Nilai; Tata Kelola

PENDAHULUAN

Perikanan skala kecil memegang peranan penting dalam perekonomian pesisir, baik sebagai sumber mata pencaharian maupun penyedia pangan

laut global. Menurut FAO (2024), lebih dari 90% tenaga kerja sektor perikanan dunia berasal dari nelayan skala kecil, yang sebagian besar beroperasi di negara berkembang. Namun, kontribusi besar

tersebut tidak selalu sejalan dengan distribusi manfaat ekonomi yang diterima.

Berbagai studi menunjukkan bahwa dalam sistem rantai nilai hasil laut, nilai ekonomi cenderung terakumulasi pada aktor di tingkat hilir—seperti eksportir, perusahaan pengolahan, dan distributor—sementara nelayan kecil memperoleh porsi nilai yang jauh lebih rendah (Hicks et al., 2022; Wiranthi et al., 2024). Ketimpangan ini memperlihatkan adanya masalah keadilan ekonomi yang kompleks, melibatkan dimensi sosial, politik, dan kelembagaan.

Dalam konteks Indonesia, tantangan serupa juga terjadi. Sektor perikanan tangkap menyumbang sekitar 6,8 juta ton produksi per tahun dan menjadi tulang punggung bagi lebih dari dua juta nelayan (KKP, 2024). Namun, nilai tambah terbesar masih dikuasai oleh pelaku industri dan eksportir besar, terutama dalam komoditas seperti tuna, udang, dan ikan kering. Sementara itu, nelayan kecil menghadapi keterbatasan modal, akses pasar, dan perlindungan sosial.

Fenomena ini memunculkan pertanyaan mendasar: bagaimana rantai nilai perikanan dapat dikelola secara adil sehingga nilai ekonomi terdistribusi lebih merata. Bagaimana pelajaran dari konteks global dapat diterapkan di Indonesia untuk membangun sistem perikanan yang inklusif dan berkelanjutan.

Adapun kajian dalam artikel ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis perkembangan konseptual dan empiris terkait keadilan ekonomi dalam rantai nilai perikanan;
2. Membandingkan dinamika ketimpangan nilai antara kasus global dan Indonesia; dan
3. Mengidentifikasi strategi transformasi menuju sistem perikanan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Kajian ini penting tidak hanya untuk memperkaya wacana akademik, tetapi juga untuk mendukung agenda

nasional dalam pembangunan ekonomi biru yang berkeadilan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, serta kebijakan Ekonomi Biru KKP (2023).

Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini menekankan integrasi antara teori keadilan ekonomi (Rawls, 1971; Sen, 2009; Fraser, 2010) dengan teori tata kelola perikanan dan sistem sosial-ekologis (social-ecological systems). Dengan demikian, artikel ini tidak hanya membahas distribusi nilai ekonomi, tetapi juga menyoroti aspek representasi, pengakuan, dan partisipasi sosial dalam tata kelola perikanan.

METODE

Artikel ini disusun dengan menggunakan pendekatan kajian literatur sistematis (systematic literature review) yang bertujuan untuk mensintesis pengetahuan terkini tentang hubungan antara rantai nilai dan keadilan ekonomi dalam konteks perikanan skala kecil. Kajian literatur sistematis dipilih karena mampu mengidentifikasi tren tematik, kesenjangan pengetahuan (research gaps), serta arah pengembangan kebijakan yang relevan (Tranfield et al., 2003; Snyder, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Utama

Merujuk pada sintesis pada 20 artikel, diketahui bahwa artikel-artikel tersebut dalam kerangka teorinya berasal dari tiga landasan utama: teori keadilan ekonomi, teori rantai nilai global (Global Value Chain/GVC), dan pendekatan tata kelola sosial-ekologis (Social-Ecological Systems/SES). Integrasi ketiga teori ini penting untuk memahami tidak hanya bagaimana nilai ekonomi terbentuk, tetapi juga bagaimana nilai tersebut didistribusikan dan dipengaruhi oleh struktur kekuasaan serta kebijakan. Dari

tiga landasan utama teori tersebut kemudian digabungkan sehingga menjadi dasar utama dalam penulisan artikel ini.

Teori Keadilan Ekonomi

Konsep keadilan ekonomi berakar pada pemikiran John Rawls (1971) dalam *A Theory of Justice*, yang menekankan pentingnya fair distribution of resources. Rawls menegaskan bahwa keadilan sejati tercapai ketika ketimpangan hanya diperbolehkan sejauh memberi manfaat bagi kelompok paling lemah (difference principle). Dalam konteks perikanan, prinsip ini diterjemahkan sebagai perlunya sistem distribusi nilai yang menjamin nelayan kecil mendapatkan manfaat ekonomi yang proporsional dengan kontribusinya.

Amartya Sen (2009) kemudian memperluas gagasan ini melalui pendekatan capabilities, yang menilai keadilan bukan sekadar pada hasil ekonomi, tetapi juga pada kesempatan yang dimiliki individu untuk berpartisipasi dan meningkatkan kesejahteraannya. Sedangkan Nancy Fraser (2010) menekankan pentingnya tiga dimensi keadilan:

1. Redistribusi (pembagian nilai ekonomi secara adil),
2. Pengakuan (penghargaan terhadap identitas sosial dan peran), dan
3. Representasi (keterlibatan dalam pengambilan keputusan).

Ketiga dimensi ini menjadi dasar analisis artikel ini dalam menilai keadilan ekonomi dalam rantai nilai perikanan.

Teori Rantai Nilai Global (Global Value Chain)

Teori Global Value Chain (GVC) (Gereffi et al., 2005) menjelaskan bagaimana produk melewati serangkaian proses produksi dan distribusi yang melibatkan banyak aktor lintas negara. Dalam sistem ini, kekuasaan ekonomi cenderung terpusat pada aktor di bagian hilir rantai (seperti eksportir dan pengecer global), sementara produsen di hulu (nelayan) berada pada posisi lemah.

Dalam konteks perikanan, penelitian seperti Wiranthi et al. (2024) dan Phelan et al. (2023) menunjukkan bahwa nelayan Indonesia sering terjebak dalam struktur captive value chain, di mana mereka tergantung pada pembeli tunggal dan memiliki posisi tawar rendah. Hal ini mengakibatkan distribusi nilai ekonomi yang timpang dan sulitnya mencapai keadilan distributif.

Pendekatan Tata Kelola Sosial-Ekologis (Social-Ecological Systems)

Pendekatan SES (Ostrom, 2009; Berkes et al., 2018) digunakan untuk memahami hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan dalam sistem perikanan. Pendekatan ini menekankan bahwa keberlanjutan sosial tidak dapat dipisahkan dari keberlanjutan ekologi.

Dalam sistem perikanan, tata kelola yang adil harus mempertimbangkan:

1. Hak akses dan kepemilikan sumber daya laut,
2. Partisipasi komunitas lokal dalam pengelolaan, dan
3. Keterkaitan antara kesejahteraan sosial dan kesehatan ekosistem.

Integrasi antara GVC dan SES memungkinkan analisis yang lebih holistik, karena keadilan ekonomi dalam perikanan tidak hanya bergantung pada pasar, tetapi juga pada keberlanjutan ekologis dan kekuatan kelembagaan.

Hasil Analisis

Selanjutnya hasil sintesis terhadap 20 artikel ilmiah yang ditinjau menunjukkan bahwa isu keadilan ekonomi dalam rantai nilai perikanan mencakup empat tema besar seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu ketimpangan nilai dan struktur pasar global, dimensi sosial dan gender, tata kelola dan keadilan prosedural, serta perlindungan sosial dan transformasi kebijakan. Keempat tema ini saling berkaitan dan menggambarkan kompleksitas hubungan antara pasar, masyarakat, dan kebijakan dalam

menentukan kesejahteraan pelaku perikanan skala kecil.

Ketimpangan Nilai dalam Rantai Pasok Perikanan Global

Secara global, rantai nilai perikanan memperlihatkan struktur yang sangat hierarkis. Sebagian besar nilai ekonomi yang dihasilkan dari produk laut terkonsentrasi di tingkat hilir — pada eksportir, perusahaan pengolahan, dan jaringan distribusi internasional (Vandergeest, 2025; Basurto et al., 2025). Dalam studi kasus Mahi-Mahi di Peru dan tuna di Indonesia, misalnya, nelayan hanya menerima kurang dari 10% dari harga akhir produk di pasar ekspor (Wiranthi et al., 2024; Phelan et al., 2023).

Ketimpangan nilai ini diperkuat oleh sistem buyer-driven chain, di mana standar kualitas, harga, dan waktu panen ditentukan oleh pembeli besar atau lembaga sertifikasi internasional (Hicks et al., 2022). Dalam sistem ini, nelayan kecil tidak memiliki keleluasaan untuk menegosiasikan harga atau menentukan standar produksi, karena posisi mereka bergantung pada kontrak jangka pendek dan akses terhadap kredit dari tengkulak atau eksportir.

Tabel berikut memperlihatkan distribusi nilai ekonomi di sepanjang rantai pasok perikanan global dibandingkan konteks Indonesia:

Tabel 1 Distribusi Nilai Ekonomi Rantai Nilai Perikanan (%)

Pelaku Rantai Nilai	Global (Rata-rata)	Indonesia (Tuna & Ikan Kering)
Nelayan kecil	8%	10%
Pedagang pengumpul	15%	18%
Eksportir/pengolah	40%	38%
Importir & ritel	37%	34%

Sumber: diadaptasi dari Wiranthi et al. (2024), Basurto et al. (2025), Phelan et al. (2023).

Dari tabel di atas terlihat bahwa struktur distribusi nilai ekonomi di Indonesia relatif tidak berbeda jauh dari tren global, dengan nelayan hanya memperoleh porsi sekitar 10%. Padahal, mereka menanggung risiko tertinggi, seperti cuaca ekstrem, biaya bahan bakar, dan ketidakpastian pasar.

Implikasi dari struktur nilai yang timpang ini adalah kerentanan ekonomi dan sosial. Ketika harga bahan bakar naik atau ekspor terganggu, nelayan tidak memiliki ruang adaptasi yang cukup karena margin keuntungan yang sempit.

Hal ini menunjukkan bahwa keadilan ekonomi dalam rantai nilai perikanan tidak dapat dicapai tanpa intervensi kelembagaan yang mampu memperkuat posisi tawar nelayan.

Dimensi Sosial dan Gender dalam Rantai Nilai Perikanan

Peran perempuan dalam sistem perikanan sering kali tersembunyi (invisible labour). Meskipun mereka terlibat aktif dalam penanganan pasca panen, pengolahan, dan perdagangan lokal, kontribusi mereka jarang diakui secara formal dalam statistik atau kebijakan (Chambon et al., 2023; Pradhan et al., 2022).

Di Afrika Timur dan Asia Tenggara, studi menunjukkan bahwa perempuan menguasai hingga 60% aktivitas pengolahan hasil laut skala kecil, tetapi hanya sedikit yang memiliki akses terhadap modal, aset, atau posisi kepemimpinan (Estévez et al., 2021).

Dalam konteks Indonesia, khususnya di pesisir Jawa dan Nusa Tenggara, perempuan memainkan peran penting dalam pengolahan ikan asin, terasi, dan penjualan lokal. Namun, ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya dan pasar menyebabkan mereka tidak memperoleh manfaat ekonomi yang setara dengan laki-laki (KKP, 2024).

Perbandingan kontribusi dan hambatan peran perempuan di berbagai konteks disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2 Kontribusi dan Hambatan Perempuan dalam Rantai Nilai Perikanan

Aspek	Global (Afrika, Asia Tenggara)	Indonesia (Studi Kasus Ikan Kering & Tuna)
Keterlibatan kerja	50–60% tenaga pengolahan	55–65% tenaga kerja pascapanen
Akses terhadap modal	Terbatas (<20%)	Terbatas, bergantung pada pinjaman informal
Kepemilikan usaha	Rendah (<10%)	Sekitar 8–12%
Keterlibatan kebijakan	Meningkat (co-management gender-responsive)	Rendah, partisipasi tidak formal
Tantangan utama	Pengakuan dan perlindungan sosial	Dominasi struktur patriarki lokal

Sumber: Chambon et al. (2023); Pradhan et al. (2022); KKP (2024).

Masalah gender dalam rantai nilai bukan sekadar isu kesetaraan, tetapi juga dimensi ekonomi penting. Studi menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi perempuan dalam kepemilikan usaha kecil dapat meningkatkan efisiensi produksi dan memperluas pasar domestik (Subramaniam et al., 2023). Oleh karena itu, integrasi kebijakan gender mainstreaming dalam program perikanan bukan hanya tuntutan moral, tetapi juga strategi pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Tata Kelola dan Keadilan Prosedural

Keadilan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari keadilan prosedural, yakni keterlibatan aktor lokal dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya (Jentoft et al., 2022). Berbagai penelitian di Chile dan Filipina menunjukkan bahwa model co-management berbasis komunitas mampu

memperbaiki distribusi nilai sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap aturan pengelolaan (Estévez et al., 2021).

Namun, di Indonesia, penerapan prinsip co-management masih menghadapi kendala struktural. KKP telah menginisiasi beberapa program seperti Kampung Nelayan Maju dan Ekonomi Biru Berkeadilan (2023), tetapi mekanisme partisipasi masyarakat masih lemah karena dominasi kebijakan bersifat top-down (Phelan et al., 2023). Tabel berikut menggambarkan perbandingan tingkat partisipasi nelayan dalam proses pengambilan keputusan di berbagai konteks:

Tabel 3 Tingkat Partisipasi Nelayan dalam Tata Kelola Perikanan (%)

Konteks Negara	Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan	Tingkat Kepercayaan terhadap Pemerintah
Chile	78%	72%
Filipina	70%	68%
Indonesia	43%	40%

Sumber: Estévez et al. (2021); Phelan et al. (2023).

Dari data tersebut terlihat bahwa tingkat partisipasi nelayan di Indonesia relatif rendah, menunjukkan bahwa kebijakan partisipatif masih sebatas retorika administratif, belum menjadi praktik substantif. Padahal, penelitian Jentoft et al. (2022) menunjukkan bahwa peningkatan kepercayaan dan partisipasi komunitas lokal berdampak positif terhadap produktivitas dan keberlanjutan sumber daya. Oleh karena itu, untuk mencapai keadilan ekonomi, tata kelola perikanan perlu didesain ulang menjadi lebih interaktif, deliberatif, dan berbasis komunitas.

Perlindungan Sosial dan Transformasi Kebijakan

Tema terakhir yang muncul kuat dalam literatur adalah perlunya sistem perlindungan sosial dalam sektor perikanan (Tabé-Ojong et al., 2025; Basurto et al., 2025). Perlindungan sosial

mencakup jaminan kesehatan, asuransi nelayan, bantuan pasca bencana, dan dukungan harga dasar. Negara seperti Ghana dan Senegal telah menerapkan skema Blue Social Protection, yang mengintegrasikan bantuan tunai adaptif dengan pelatihan diversifikasi usaha.

Di Indonesia, meskipun sudah ada program Asuransi Nelayan dan Bantuan Modal KUR Perikanan, cakupannya masih terbatas. Program ini belum menyentuh aspek perlindungan pasar dan stabilisasi harga yang menjadi akar ketimpangan nilai ekonomi.

Tabel 4 Komparasi Skema Perlindungan Sosial di Negara Berkembang

Negara	Jenis Skema	Cakupan	Dampak terhadap Ketahanan Ekonomi
Ghana	Blue Social Protection (BSP)	45% nelayan aktif	Peningkatan pendapatan 22%
Senegal	BSP + Diversifikasi usaha	50% komunitas pesisir	Peningkatan resiliensi iklim
Indonesia	Asuransi Nelayan & KUR	25% nelayan aktif	Dampak ekonomi masih terbatas

Sumber: Tabe-Ojong et al. (2025); KKP (2024).

Perbandingan di atas menunjukkan bahwa pendekatan perlindungan sosial di Indonesia masih bersifat instrumental, belum transformasional. Untuk memperkuat keadilan ekonomi, kebijakan sosial perlu diarahkan pada:

1. Integrasi perlindungan sosial dengan program pemberdayaan ekonomi lokal,
2. Penguatan koperasi nelayan dan akses pasar langsung, serta
3. Pemanfaatan teknologi digital untuk memperpendek rantai pasok dan meningkatkan transparansi harga.

Diskusi Komparatif: Pembelajaran Dari Konteks Global Dan Implikasinya Bagi Indonesia

Hasil kajian lintas wilayah memperlihatkan bahwa persoalan keadilan ekonomi dalam rantai nilai perikanan memiliki pola yang serupa di berbagai negara berkembang, namun dengan perbedaan dalam kapasitas kelembagaan, intervensi kebijakan, dan dinamika sosial lokal.

Secara umum, negara yang berhasil memperbaiki distribusi nilai dalam sistem perikanan memiliki tiga karakteristik utama:

1. Adanya reformasi kelembagaan yang memperkuat posisi tawar nelayan kecil. Chile dan Filipina, misalnya, menerapkan pendekatan co-management dengan melibatkan nelayan dalam proses perencanaan dan penentuan kuota tangkap (Estévez et al., 2021). Hal ini meningkatkan legitimasi kebijakan dan meminimalkan konflik sosial. Di Indonesia, praktik serupa masih terbatas pada beberapa wilayah seperti Wakatobi dan Maluku, namun keberhasilannya menunjukkan potensi besar jika diperluas secara nasional.
2. Penerapan kebijakan redistribusi nilai berbasis pasar yang inklusif. Program Fair Trade Fisheries di Peru dan Indonesia Timur menunjukkan bahwa sertifikasi berbasis komunitas mampu meningkatkan pendapatan nelayan sebesar 10–15% (Wiranthi et al., 2024). Namun, tantangan muncul dalam biaya sertifikasi dan ketergantungan terhadap pasar ekspor. Oleh karena itu, Indonesia perlu menyeimbangkan pendekatan pasar dengan penguatan ekonomi lokal melalui koperasi dan local seafood branding yang meningkatkan nilai tambah di tingkat komunitas.
3. Integrasi keadilan sosial dalam kebijakan ekonomi biru. Pendekatan Blue Economy yang berorientasi pertumbuhan tanpa memperhatikan keadilan sosial berisiko

memperdalam ketimpangan (Basurto et al., 2025). Negara seperti Ghana dan Senegal berhasil menunjukkan bahwa Blue Social Protection dapat memperkuat keadilan ekonomi sekaligus ketahanan sosial-ekologis. Indonesia memiliki peluang besar untuk mengadopsi konsep serupa dengan mengintegrasikan perlindungan sosial ke dalam program pemberdayaan ekonomi pesisir berbasis komunitas.

Relevansi bagi Pembangunan Perikanan Indonesia

Hasil kajian ini memiliki implikasi penting bagi kebijakan nasional Indonesia. Pertama, program ekonomi biru yang saat ini menjadi fokus Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu dilengkapi dengan indikator keadilan sosial dan ekonomi. Artinya, keberhasilan pembangunan perikanan tidak cukup diukur dari nilai ekspor atau produksi, tetapi juga dari tingkat kesejahteraan dan kemandirian nelayan kecil.

Kedua, penguatan kelembagaan lokal menjadi kunci. Koperasi nelayan dan kelompok pengolahan ikan (Poklahsar) dapat dijadikan instrumen utama untuk memperpendek rantai pasok dan memperbesar bagian nilai yang diterima nelayan. Model cluster ekonomi perikanan yang berbasis pada integrasi hulu-hilir di tingkat lokal perlu diperluas di wilayah-wilayah dengan ketergantungan tinggi pada tengkulak.

Ketiga, digitalisasi pasar hasil laut menjadi strategi penting untuk menciptakan transparansi harga dan memutus mata rantai ketimpangan. Platform digital lokal seperti e-Fishery dan Aruna dapat dijadikan contoh bagaimana teknologi mampu meningkatkan posisi tawar nelayan. Namun, akses terhadap infrastruktur digital dan literasi keuangan masih menjadi tantangan besar yang harus diatasi melalui kebijakan inklusif.

Pembelajaran Konseptual: Dari “Blue Growth” ke “Blue Justice”

Secara konseptual, literatur terbaru memperlihatkan pergeseran paradigma dari blue growth ke blue justice (Cohen et al., 2023; Vandergeest, 2025). Jika blue growth berfokus pada peningkatan efisiensi ekonomi dan investasi biru, maka blue justice menekankan pemerataan manfaat, pengakuan hak-hak sosial, dan perlindungan komunitas lokal.

Dalam konteks Indonesia, adopsi paradigma blue justice berarti menempatkan nelayan kecil bukan hanya sebagai penerima kebijakan, tetapi sebagai aktor utama dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan semangat inclusive governance dalam RPJMN 2025–2029 dan Rencana Aksi Ekonomi Biru Nasional (KKP, 2024).

SIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa keadilan ekonomi dalam rantai nilai perikanan merupakan isu multidimensional yang melibatkan aspek pasar, sosial, dan kelembagaan. Sintesis terhadap 20 artikel ilmiah mengungkapkan bahwa ketimpangan nilai masih mendominasi, di mana nelayan kecil hanya memperoleh 8–12% dari nilai akhir produk, sementara sebagian besar nilai dikuasai oleh eksportir dan industri hilir. Keadilan prosedural dan sosial, melalui partisipasi lokal, pengakuan gender, dan transparansi kebijakan, berperan penting dalam memperbaiki distribusi nilai. Penguatan kelembagaan komunitas dan perlindungan sosial juga terbukti meningkatkan posisi tawar nelayan dan ketahanan ekonomi pesisir. Oleh karena itu, pembangunan perikanan Indonesia perlu mengadopsi pendekatan blue justice dan menempatkan keadilan ekonomi sebagai dasar menuju sistem perikanan yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Allison, E. H., Ratner, B. D., Åsgård, B., Willmann, R., Pomeroy, R., & Kurien, J. (2020). Rights-based fisheries governance: From fishing rights to human rights. *Fish and Fisheries*, 21(3), 654–670.
- Arthur, R., et al. (2022). Small-scale fisheries and local food systems: Drivers of change and justice implications. *Fish and Fisheries*, 23(5), 1023–1038.
- Basurto, X., et al. (2025). Illuminating multidimensional contributions of small-scale fisheries to food systems and implications for justice. *Nature Food*, 6(2), 87–98.
- Berkes, F., Folke, C., & Colding, J. (2018). *Navigating social–ecological systems: Building resilience for complexity and change*. Cambridge University Press.
- Chambon, M., et al. (2023). Women’s participation in small-scale fisheries value chains. *Fish and Fisheries*, 24(1), 231–248.
- Cohen, P. J., et al. (2023). Blue justice for small-scale fisheries in the global south. *Marine Policy*, 149, 105678.
- Estévez, R., et al. (2021). Procedural justice in Chilean benthic fisheries co-management. *Marine Policy*, 132, 104672.
- Gereffi, G., Humphrey, J., & Sturgeon, T. (2005). The governance of global value chains. *Review of International Political Economy*, 12(1), 78–104.
- Hicks, C., et al. (2022). Rights and representation in global aquatic food systems. *Fish and Fisheries*, 23(2), 445–459.
- Jentoft, S., & Chuenpagdee, R. (2015). *Interactive governance for small-scale fisheries: Global reflections*. Springer.
- Jentoft, S., et al. (2022). Interactive learning and governance transformation for social justice in fisheries. *Maritime Studies*, 21(3)
- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (2024). *Laporan Statistik Perikanan Tangkap dan Ekonomi Biru Berkeadilan 2023*. Jakarta: KKP RI.
- Phelan, A., et al. (2023). Small-scale fisheries and value chain analysis: An Indonesian case. *Marine Policy*, 146, 105614.
- Pradhan, S., et al. (2022). Dried fish value chains and wellbeing. *Fish and Fisheries*, 23(4), 763–777.
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.
- Sen, A. (2009). *The idea of justice*. Harvard University Press.
- Subramaniam, R., et al. (2023). Socio-ecological resilience in seafood supply chains. *Fish and Fisheries*, 24(2), 410–425.
- Tabe-Ojong, M., et al. (2025). Social protection and aquatic food systems: Links to blue economy. *Nature Food*, 6(3), 122–134.
- Vanderveest, P. (2025). Labour justice in seafood supply chains. *Maritime Studies*, 22(1), 25–43.
- Villasante, S., et al. (2022). Social-ecological traps in small-scale fisheries. *Fish and Fisheries*, 23(3), 512–528.
- Wiranthi, P. E., et al. (2024). Multi-tier captive relations in the global tuna value chain: Fair Trade case studies. *Marine Policy*, 150, 105721.